

## Realisasi APBD 2023 Rp7,8 Triliun



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 08/07/2024*

**TENGGARONG** – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar membeberkan realisasi APBD 2023. Juru Bicara Banggar DPRD Kukar, Firnadi Ikhsan mengatakan, realisasi anggaran 2023 sebesar Rp7,8 triliun atau 85,68 persen dari total anggaran sebesar Rp9,08 triliun.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), APBD Kukar tidak selalu berjalan mulus,” ujarnya saat menyampaikan laporan pada Rapat Paripurna Ke-12 Masa Sidang III, Senin (1/7) malam.

Sebelum Pertanggungjawaban APBD 2023 disahkan menjadi Perda, Banggar lebih dulu menyampaikan hasil pembahasan yang dilakukan di dalam rapat-rapat paripurna, serta mendapatkan audit dari BPK.

Menurut Firnadi, dalam laporan yang dibacakannya memerhatikan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Bupati Kukar wajib menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban pada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. (adv/kri)

### **Sumber berita:**

1. KaltimPost, Realisasi APBD 2023 Rp7,8 Triliun, 08/07/24

**Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Dalam Pasal 1 angka 18 UU 1/2022 dijelaskan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah perda provinsi dan perda kabupaten/kota.